
KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**KEGIATAN : PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
LINGKUP KEUANGAN DAERAH.**

**SUB KEGIATAN : IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG
KEUANGAN DAERAH**

**REKENING : BELANJA PEMELIHARAAN ASET TIDAK
BERWUJUD~SOFTWARE**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAKASSAR**

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

KERANGKA ACUAN KERJA

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN (SIMAKDA)

A. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sehingga Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.55 Tahun 2008 dan Permendagri No.32 Tahun 2011 dinyatakan sudah tidak berlaku.

Sesuai dengan perubahan arah kebijakan baru tersebut, maka Pemerintah Daerah harus membenahi berbagai hal, agar melaksanakan kebijakan baru tersebut dapat berjalan maksimal, antara lain dengan terus memberikan pemahaman terhadap pembaharuan kebijakan, penyiapan sumber daya manusia, bahkan sampai terus pada pengembangan sistem dan prosedur administrasi keuangan.

Agar keseluruhan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari penyusunan APBD 2024 sampai dengan penyajian laporan akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta integrasi aplikasi yang selama ini sudah berjalan dapat melakukan penyesuaian perubahan kebijakan yang baru, sehingga proses Pengelolaan Keuangan Daerah tetap dapat berjalan efektif secara transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif melalui Sistem Aplikasi Keuangan Daerah yang telah terbangun selama ini, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar akan melakukan kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Maksud Dan Tujuan

Kegiatan Pemeliharaan dan pengembangan SIMAKDA Tahun Anggaran 2023 ini dilaksanakan dengan maksud sebagai berikut :

1. Memelihara/maintenance Aplikasi dan Database dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMAKDA) yang sudah berjalan selama ini;

2. Mengembangkan aplikasi keuangan (SIMAKDA) sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menjawab tantangan masa kini.

Sedangkan tujuan dari Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan ;
2. Pelaporan akuntansi keuangan yang akurat, handal dan valid.

C. Sasaran

1. Terlaksananya Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah yang dapat dilaksanakan tepat waktu, akurat, handal efisien dan efektif. Sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang dapat mengimplementasikan sistem Aplikasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya;
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 6).

E. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

F. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dari APBD Kota Makassar tahun Anggaran 2023

- G. Nama PPK : Drs. Muh. Dakhlan, M.Si
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

H. Lingkup Pekerjaan

1. **Manajemen User**
Pengelompokan user berdasarkan wewenang.
2. **Penambahan Fasilitas User Logs**
Pencatatan Setiap Aktivitas dari User Sistem.
3. **Penambahan Modul Asistensi RKA**
Penambahan Modul Evaluasi RKA untuk evaluasi dokumen RKA SKPD
 - Menu Verifikasi.
 - Menu Laporan Hasil Evaluasi
4. **Penambahan Laporan Monitoring dan Evaluasi**
Penambahan Report untuk monitoring dan evaluasi pimpinan baik berbentuk tabel maupun grafik berupa
 - a. Laporan sisa kas per-SKPD
 - b. Laporan Perbandingan SPD dengan SPP/SPM/SP2D
 - c. Laporan Realisasi sesuai format KE PAPBJ.
5. **Penambahan Form Input SPP/SPM Untuk Pembayaran Pihak Ketiga Lainnya**
 - a. Tambah Form Input SPP
Penambahan form inputan SPP untuk Pencairan SPM dan SP2D Kategori Langsung ke Pihak ketiga lainnya/Selain LS Gaji dan LS Barang dan Jasa seperti Belanja Hibah, Belanja Tidak Terduga, Pengeluaran pembiayaan.
 - b. Integrasi dengan Aplikasi Simbansos.
Penarikan data Administrasi Pencairan Hibah/Bantuan pada aplikasi Simbansos ke aplikasi simakda.
6. **Penambahan Modul Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban BOK Sesuai Regulasi Yang Baru**
Menambahkan Modul Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Kesehatan Sesuai Regulasi yang Baru yaitu PMK Nomor 11 Tahun 2022.
7. **Penambahan Modul Pengajuan Pergeseran Anggaran**
Penambahan modul Pengajuan Pergeseran Anggaran yang mendahului Perubahan Perda APBD dan pergeseran setelah dilakukan perubahan APBD, beserta dokumen yang menyertainya.
8. **Penyesuaian Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Sesuai Juknis Yang Baru**
Menyesuaikan Modul Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Sesuai Juknis yang berlaku.- permendagri no 3 tahun 2023
9. **Modifikasi Tracking Dokumen**

- Penambahan Modul dalam hal pencarian cepat terhadap SPP, SPB,SPM dan SP2D.
10. **Penyediaan Data SIKD Interkoneksi**
Penambahan modul Pengiriman Data Secara Real Time ke Kementerian.
 11. **Pengembangan Modul SAMBALU**
Modul yang memungkinkan Pengguna Anggaran dan Bendahara melakukan pencairan SPB secara Online.
 12. **Penyesuaian Integrasi dengan Aplikasi SIMGAJI TASPEN**
Penambahan komponen field Rincian Potongan dan lain lain pada API Daftar Gaji Per pegawai.
 13. **Penyesuaian Integrasi dengan Aplikasi e-KINERJA**
Penambahan API Untuk Kebutuhan Pembuatan IWP 1% di aplikasi kinerja BKD.
 14. **Perubahan skema database**
Perubahan mendasar pada skema aplikasi dan database, berupa pembuatan Replikasi Database SIMAKDA untuk memisahkan database untuk transaksi dan laporan, guna memperbaiki masalah proses penyimpanan yang lambat saat banyak laporan yang sedang di cetak.
 15. **Pendampingan kepada SKPD**
Pada lingkup pekerjaan ini, penyedia melakukan pendampingan kepada SKPD setiap hari, baik hari libur maupun hari kerja dalam hal penggunaan aplikasi. Sehingga diharapkan semua user dapat menggunakan Aplikasi dengan baik.

Dalam rangka efektivitas dan peningkatan kualitas layanan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemkot Makassar menuju kearah yang lebih baik, maka dalam perjalanan implementasinya, jika pihak pengguna jasa ingin memodifikasi Modul yang telah ada sesuai dengan kebutuhan serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku maka pihak penyedia jasa dapat menyiapkan modul yang dimaksud.

I. Standar Teknis

Sistem informasi ini berbasis Web, menggunakan Bahasa Pemrograman PHP, data base MySQL.

J. Keluaran

Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah.

K. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

1. Segala peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan di tanggung oleh pelaksana pekerjaan;
2. PPK Menyediakan ruangan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan

L. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Pekerjaan pemeliharaan SIMAKDA dilakukan selama 6 (Enam) bulan

No.	Uraian Pekerjaan	Bulan					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Manajemen User	■					
2.	Penambahan Fasilitas User Logs	■					
3.	Penambahan Modul Asistensi RKA				■	■	
4.	Penambahan Laporan Monitoring dan Evaluasi		■				
5.	Penambahan Form Input SPP/SPM Untuk Pembayaran Pihak Ketiga Lainnya			■			
6.	Penambahan Modul Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban BOK Sesuai Regulasi Yang Baru			■			
7.	Penambahan Modul Pengajuan Pergeseran Anggaran	■	■				
8.	Penyesuaian Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Sesuai Juknis Yang Baru				■		
9.	Modifikasi Tracking Dokumen				■		
10.	Penyediaan Data SIKD Interkoneksi		■				
11.	Pengembangan Modul SAMBALU				■	■	
12.	Penyesuaian Integrasi dengan Aplikasi SIMGAJI TASPEN						
13.	Penyesuaian Integrasi dengan Aplikasi e-KINERJA	■					
14.	Perubahan sekema database					■	■
15.	Pendampingan kepada SKPD	■	■	■	■	■	■

M. Personel

NO	POSISI/JABATAN	KUALIFIKASI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	JUMLAH ORANG
1.	Team Leader	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal S1 dari jurusan Sistem Informasi, Akuntansi atau Keuangan, dan atau Manajemen; - Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun dalam implementasi sistem manajemen atau keuangan pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan pembagian tugas terhadap tenaga-tenaga ahli dibawahnya. - Memberikan status report penyelesaian pekerjaan secara periodik. - Bertanggung jawab dalam mengatasi setiap permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan implementasi di lapangan 	1 Orang
2.	Tenaga Ahli Programmer	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal S1 dari jurusan Teknik Informatika (Manajemen Informatika); 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisa terhadap aplikasi pada SKPD maupun SKPKD. - Melakukan analisa bagi pelaksanaan 	1 Orang

		<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun pada perusahaan tersebut dalam bidang pengembangan SIMAKDA dan SIADINDA; - Dapat berkerja secara efektif baik secara tim maupun individu; - Bersedia bekerja hanya untuk Pengembangan SIMAKDA dan SIADINDA pada pemerintah Kota Makassar selama masa kontrak. 	<ul style="list-style-type: none"> integrasi aplikasi dan data dari masing-masing perangkat komputer. - Melakukan perancangan sistem terintegrasi dan membuat alur proses dari sistem tersebut. - Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli Akuntansi dalam pembagian tugas pada pelaksanaan pekerjaan pengelolaan sistem keuangan sesuai dengan rancangan sistem aplikasi yang telah dibuat. 	
3.	Tenaga Ahli Database Sistem	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal S1 dari Jurusan Sistem Informasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer; - Memiliki sertifikat keahlian dalam bidang database 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan programmer dalam melakukan proses konversi dan migrasi database. - Melakukan perhitungan terhadap jumlah table space, congestion, dan lain-lain dari database yang dirancang. - Menyiapkan proses backup dan recovery database. - Melakukan instalasi database pada server yang telah disediakan. - Melakukan proses identifikasi terhadap kebutuhan <i>user</i> (user requirements). 	1 Orang
4.	Tenaga Implementator	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal D3 dari jurusan Sistem Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab terhadap keseluruhan 	3 Orang

		(Manajemen Informatika) atau Akuntansi atau Keuangan atau Manajemen; - Mempunyai pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun dalam bidang keuangan dan komputer	proses implementasi di SKPD dan SKPKD. - Bertanggung jawab terhadap kegiatan entry data selama pekerjaan berjalan. - Bertanggung jawab membantu dan mendampingi pengguna (user) yang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi.	
--	--	--	---	--

N. Laporan

Laporan pelaksanaan terdiri dari laporan awal dan laporan Akhir;

1. Laporan awal memuat tentang kerangka kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
2. Laporan akhir memuat laporan keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Drs. MUH. DAKHLAN, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19740925 199311 1 005